



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

 BIRO ADMINISTRASI
PENGADAAN BARANG / JASA
PEMERINTAH PROV. JAWA TENGAH

LAPORAN KERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2020



(024) 8414750



@biroapbj.jtg



@biroapbj_jtg



biroapbj@jatengprov.go.id

KATA PENGANTAR

Guna mewujudkan terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa SETDA Provinsi Jawa Tengah dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pembangunan daerah senantiasa ditujukan untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa SETDA Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, yaitu “Menjadi Institusi Terdepan Dalam Mewujudkan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan masyarakat secara Profesional dan Akuntabel Guna Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari dengan tercapainya efektivitas pelayanan pengadaan barang/jasa”.

Penyusunan laporan kinerja ini merupakan bagian dari implementasi transparansi dan akuntabilitas kinerja dalam kerangka *good governance* di lingkungan Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa SETDA Provinsi Jawa Tengah. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa SETDA Provinsi Jawa Tengah 2020 adalah merupakan perwujudan pertanggungjawaban yang jelas, terukur, legitimate dan berkesinambungan sebagai hasil kinerja Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa SETDA Provinsi Jawa Tengah dalam mendukung akselerasi pencapaian visi dan misi Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa SETDA Provinsi Jawa Tengah.

Dengan dukungan sumber daya manusia yang profesional, sumber keuangan yang memadai dan sarana prasarana yang dimiliki serta semangat kebersamaan dalam mendukung visi dan misi Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa SETDA Provinsi Jawa Tengah, syukur alhamdulillah pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan di Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa SETDA Provinsi Jawa Tengah dapat dilaksanakan dengan efektif dan capaian kinerja yang baik.

Capaian kinerja ini secara akuntabel dituangkan dalam LKjIP Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa SETDA Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020. Perlu disadari bahwa apa yang telah kita lakukan ini masih belum sempurna. Melalui pelaporan kinerja kami berharap terlihat sasaran yang telah tercapai maupun yang belum dapat diraih, sehingga Laporan Kinerja ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dan solusi yang dapat diimplementasikan. Sehingga kinerja Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa SETDA Provinsi Jawa Tengah di masa mendatang akan menjadi lebih baik.

Semarang,

2021

KEPALA BIRO ADMINISTRASI
PENGADAAN BARANG/JASA SETDA
PROVINSI JAWA TENGAH,



Ir. YUNI ASTUTI, MA
Pembina Utama Madya
NIP. 19620621 198709 2 001

DAFTAR ISI

| | |
|------------------------------------------------|-----------|
| KATA PENGANTAR | I |
| DAFTAR ISI | II |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Dasar Hukum | 2 |
| C. Maksud dan Tujuan | 2 |
| D. Gambaran Umum Organisasi | 2 |
| E. Permasalahan Utama | 8 |
| F. Sistematika Penulisan | 8 |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA..... | 9 |
| A. Perencanaan Strategis | 9 |
| B. Ringkasan/Ikhtisar Perjanjian Kinerja | 12 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | 13 |
| A. Capaian Kinerja Organisasi | 13 |
| B. Realisasi Anggaran | 22 |
| Bab IV PENUTUP | 24 |
| A. Kesimpulan | 24 |
| B. Saran dan Masukan | 25 |
| | |
| LAMPIRAN – LAMPIRAN | |
| A. Perjanjian Kinerja | |
| B. LRA | |

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka penyelenggaraan *good governance*, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan dapat dipertanggungjawabkan, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Untuk mewujudkan hal tersebut, setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang ditetapkan masing-masing instansi.

Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan, dan penilai akuntabilitas, dan Gubernur selaku Kepala Daerah. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Hal ini didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja, dan alat pendorong terwujudnya *good governance* serta alat control dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran guna kesejahteraan masyarakat. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai

pencapaian sasaran RPJMD, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator sasaran. Realisasi yang dilaporkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan kinerja hasil kegiatan Tahun 2020.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92).
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33).
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota.
5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 70).

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Biro APBJ SETDA Provinsi Jawa Tengah selama kurun waktu 1 (satu) tahun dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) juga sebagai alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja Biro APBJ SETDA Provinsi Jawa Tengah.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan *stakeholders* demi perbaikan kinerja Biro APBJ SETDA Provinsi Jawa Tengah. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) menjadi sumber untuk perbaikan, perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perbaikan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

D. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas menyusun pengoordinasian

penyusunan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat bidang administrasi pengadaan barang/jasa, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang administrasi pengadaan barang/jasa.

Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa dalam melaksanakan tugas, mempunyai fungsi:

1. Pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan sistem pengadaan barang/jasa, pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa;
2. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan sistem pengadaan barang/jasa dan pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa;
3. Membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat bidang administrasi pengadaan barang/ jasa;
4. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan sistem pengadaan barang/jasa, dan pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa;
5. Pelaksanaan pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan sistem pengadaan barang/jasa dan pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa; dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Biro APBJ SETDA Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh sumber daya manusia sebagai berikut :

1. Susunan Kepegawaian :
Susunan Kepegawaian Biro APBJ SETDA Provinsi Jawa Tengah yaitu :
a) Berdasarkan Jabatan :

Tabel 1.1.
Susunan Kepegawaian Berdasarkan Jabatan

| Unit Kerja | Eselon II | Eselon III | Eselon IV | JFT | JFU | Jumlah |
|-----------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|-----|-----|--------|
| Kepala Biro | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa | - | 1 | 3 | 29 | 11 | 44 |
| Bagian Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa | - | 1 | 2 | 1 | 6 | 10 |
| Bagian Pembinaan Dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa | - | 1 | 3 | - | 5 | 9 |
| Jumlah Total | 1 | 3 | 8 | 30 | 22 | 64 |

b) Berdasarkan Pangkat/Golongan ruang :

Tabel 1.2.

Susunan Kepegawaian Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang

| Unit Kerja | Gol IV | Gol III | Gol II | Jumlah |
|-----------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|--------|
| Kepala Biro | 1 | - | - | 1 |
| Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa | 9 | 31 | 4 | 44 |
| Bagian Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa | 2 | 4 | 4 | 10 |
| Bagian Pembinaan Dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa | 2 | 7 | - | 9 |
| Jumlah Total | 14 | 42 | 8 | 64 |

c) Berdasarkan Pendidikan :

Tabel 1.3.

Susunan Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan

| Unit Kerja | Doktoral / S3 | Pasca Sarjana | Sarjana / D-4 | Sarjana Muda | SMA/ SMK/ STM | SMP/ ST | Jml |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|---------------------|------------|-----|
| Kepala Biro | | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa | | 12 | 27 | 1 | 4 | - | 44 |
| Bagian Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa | | 3 | 3 | 4 | - | - | 10 |
| Bagian Pembinaan Dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa | 1 | 3 | 3 | 2 | - | - | 9 |
| Jumlah Total | 1 | 19 | 33 | 7 | 4 | - | 64 |

d) Berdasarkan Jenis Kelamin :

Tabel 1.4.

Susunan Kepegawaian Berdasarkan Jenis Kelamin

| Unit Kerja | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|
| Kepala Biro | - | 1 | 1 |
| Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa | 36 | 8 | 44 |
| Bagian Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa | 7 | 3 | 10 |

| | | | |
|--------------------------------------------------------|----|----|----|
| Bagian Pembinaan Dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa | 7 | 2 | 9 |
| Jumlah Total | 50 | 14 | 64 |

2. Sarana dan Prasarana

Sementara untuk mendukung tugas pokok dan fungsi tersebut Biro APBJ SETDA Provinsi Jawa Tengah memiliki sarana dan prasarana terdiri dari :

Tabel 1.5.
Sarana dan Prasarana di Biro APBJ SETDA

| No | Nama Barang | Jumlah | Kondisi |
|----|------------------------------------------------------|--------|---------|
| 1 | Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor.Lemari Besi/Metal | 5 | Baik |
| 2 | Meubelair.Sice | 1 | Baik |
| 3 | Meubelair. Meja 1/2 Biro | 5 | Baik |
| 4 | Meubelair. Kursi Rapat | 80 | Baik |
| 5 | Alat Pendingin Lemari Es | 1 | Baik |
| 6 | Dispenser | 7 | Baik |
| 7 | Meja Kerja Pejabat Eselon II | 1 | Baik |
| 8 | Meja Kerja Pejabat Eselon III | 3 | Baik |
| 9 | Meja Kerja Pejabat Eselon IV | 8 | Baik |
| 10 | Kursi Rapat Kerja Eselon II | 20 | Baik |
| 11 | Peralatan Personal Komputer | 1 | Baik |
| 12 | Almari Besi Kaca Sorong 2 Pintu | 1 | Baik |
| 13 | Pendingin Ruangan (AC) | 33 | Baik |
| 14 | Almari Besi Kaca Sorong 4 Pintu | 1 | Baik |
| 15 | Almari Besi 2 Pintu | 1 | Baik |
| 16 | Almari Kayu 2 Pintu | 1 | Baik |
| 17 | Filling Cabinet | 1 | Baik |
| 18 | Meja Informasi | 1 | Baik |
| 19 | Meja Computer | 1 | Baik |
| 20 | Kursi Putar Manager | 1 | Baik |
| 21 | Kursi Tunggu isi 3 | 1 | Baik |
| 22 | Kursi Tunggu Isi 4 | 1 | Baik |
| 23 | Kursi rapat | 1 | Baik |
| 24 | LED TV 32 Inch | 2 | Baik |
| 25 | Printer Laserjet | 1 | Baik |
| 26 | Komputer PC | 10 | Baik |
| 27 | All in one PC | 28 | Baik |
| 28 | Macbook Pro Apple | 1 | Baik |
| 29 | Laptop Acer | 1 | Baik |
| 30 | Laptop Lenovo 9220 | 2 | Baik |
| 31 | Laptop HP Spectre X360 13-AP0055TU | 6 | Baik |
| 32 | Printer Brother | 1 | Baik |
| 33 | Proyektor | 18 | Baik |
| 34 | LED TV 52 Inch | 1 | Baik |
| 35 | Kursi Kerja Eselon III dan IV | 10 | Baik |
| 36 | Kursi Eselon II | 1 | Baik |
| 37 | Printer Epson | 1 | Baik |
| 38 | Personal Komputer Desktop HP | 5 | Baik |
| 39 | Meja Kantor | 1 | Baik |
| 40 | Almari Pakaian | 1 | Baik |
| 41 | Printer DeskJet EPSON L3110 | 10 | Baik |

| | | | |
|----|----------------------------------------------------------|----|------|
| 42 | Laptop ACER Z3-451/8 | 3 | Baik |
| 43 | Kursi Staf | 20 | Baik |
| 44 | Meja Komputer Orbitrend | 10 | Baik |
| 45 | Printer HP Laserjet Pro MFP M28A | 6 | Baik |
| 46 | Printer DeskJet EPSON L6160 | 1 | Baik |
| 47 | Mobil Eselon | 5 | Baik |
| 48 | Sepeda Motor | 2 | Baik |
| 49 | Kamera | 1 | Baik |
| 50 | TV LED Samsung Flat Smart TV 65 INCH [UA65RU7100] | 2 | Baik |
| 51 | Portable AUDIO | 1 | Baik |
| 52 | Uninterruptable Power Supply | 10 | Baik |
| 53 | External Hardisk | 2 | Baik |
| 54 | Meja rapat | 1 | Baik |
| 55 | Sofa tamu | 7 | Baik |
| 56 | Kursi tamu | 6 | Baik |
| 57 | Buffet Pendek | 2 | Baik |
| 58 | Penarikan Jaringan Backbone & penataan jaringan internet | 1 | Baik |
| 59 | Laptop Thosiba 2013 | 9 | Baik |

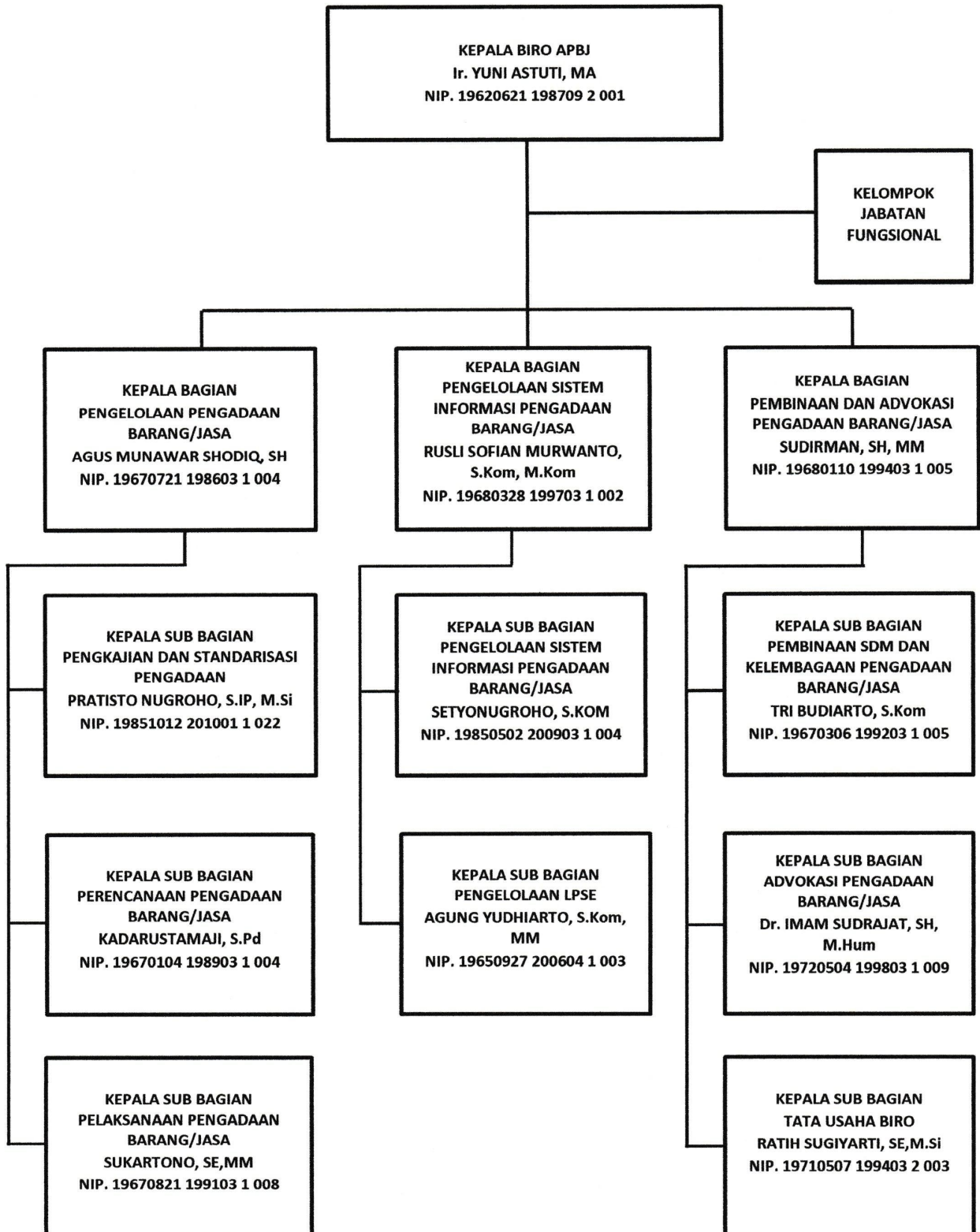
3. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Biro APBJ SETDA Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, terdiri dari:

- a) Kepala Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa;
- b) Kelompok Jabatan Fungsional;
- c) Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Pengkajian Dan Standarisasi Pengadaan.
 - 2) Sub Bagian Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa.
 - 3) Sub Bagian Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- d) Bagian Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa.
 - 2) Sub Bagian Pengelolaan LPSE.
- e) Bagian Pembinaan Dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Pembinaan SDM dan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa.
 - 2) Sub Bagian Advokasi Pengadaan Barang/Jasa.
 - 3) Sub Bagian Tata Usaha Biro.

Bagan 1.1.
Struktur Organisasi Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa

**STRUKTUR ORGANISASI
BIRO APBJ SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH**



E. PERMASALAHAN UTAMA

Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa SETDA Provinsi Jawa Tengah melaksanakan berbagai tugas dan fungsi guna mewujudkan efektivitas pelayanan pengadaan barang/jasa. Berikut permasalahan utama (*strategic issued*) pada lingkup Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Jawa Tengah, yaitu:

1. Tata kerja pengkajian, perencanaan, dan pelaksanaan kebijakan pengadaan barang/jasa belum optimal.
2. Modernisasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) masih belum optimal.
3. Kapasitas SDM, pembinaan kelembagaan, dan advokasi pengadaan barang/jasa perlu ditingkatkan.
4. Rawan adanya gratifikasi (KKN) dalam proses pengadaan barang/jasa yang berakibat tidak selesainya pekerjaan atau berlanjut dalam proses hukum.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang perlunya LKjIP yang diawali dengan uraian singkat tentang Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi Biro APBJ SETDA Provinsi Jawa Tengah. Selain itu dimuat pula tentang landasan hukum penyusunan LKjIP dan aspek strategis/isu strategis, keterkaitan dengan Renstra dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Dalam bab ini berisi Visi, Misi, Tujuan (merupakan penjabaran Visi SKPD yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan visi misi pembangunan jangka menengah dilengkapi dengan rencana kinerja Biro APBJ SETDA Provinsi Jawa Tengah.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini memuat penjelasan prioritas program dan kegiatan beserta analisis capaian kinerja kantor serta akuntabilitas keuangan (Realisasi Anggaran).

BAB IV. PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dan saran.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa SETDA Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 - 2023, adalah sebuah dokumen perencanaan lima tahunan yang akan dijadikan acuan bagi perencanaan tahunan selama kurun waktu Tahun 2019 - 2023.

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen formal dalam sistem pemerintah sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelayanan Organisasi Perangkat Daerah khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan sesuai dengan masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Kualitas Rencana Strategis (Renstra) sangat ditentukan oleh kemampuan Organisasi Perangkat Daerah dalam memahami permasalahan dan tugas pokok dan fungsi serta dipengaruhi pula oleh kemampuan menerjemahkan sasaran dan program pembangunan RPJMD ke dalam Rencana Strategis (Renstra).

Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa yang merupakan Unit Kerja dari Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah mempunyai peran yang sangat strategis dalam pelaksanaan pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Jawa Tengah. Oleh Karena itu Renstra Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa menjadi satu kesatuan dalam Renstra Sekretariat Daerah (SETDA) Tahun 2019 - 2023.

Dalam Renstra Sekretariat Daerah (SETDA) telah ditetapkan rumusan tujuan yang hendak dicapai oleh Sekretariat Daerah Tahun 2019 – 2023 yaitu:

“Meningkatkan Efektivitas Manajemen Pemerintahan Daerah”.

Guna mencapai hasil yang diharapkan dari suatu Tujuan Sekretriati Daerah Provinsi Jawa Tengah dimaksud, maka rumusan Sasaran yang akan dicapai oleh Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan adalah:

1. Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Daerah,
2. Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan
3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administasi Umum, dan Pembinaan ASN di lingkungan Sekretariat Daerah.

Guna mewujudkan sasaran tersebut, Renja Sekretariat Daerah Tahun 2020 merumuskan sejumlah program, yaitu:

Sasaran Pertama, Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Daerah akan diwujudkan melalui dua program, yaitu: Program Peningkatan Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Program Penataan Peraturan Perundang-undangan.

Sasaran Kedua, Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan diwujudkan melalui empat program, yaitu: Program Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Daerah, Program Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah, Program

Adminstrasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan Program Peningkatan Pelaksanaan Otonomi Daerah.

Sasaran Ketiga, Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administasi Umum, dan Pembinaan ASN di lingkungan Sekretariat Daerah akan diwujudkan melalui tiga program, yaitu: Program Pelayanan Umum, Keprotokolan dan Kehumasan; Program Manajemen, Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah; dan Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa melaksanakan sasaran nomor 2 (dua) yaitu Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan diwujudkan melalui 2 (dua) program, yaitu: Program Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Daerah dan Program Manajemen, Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah.

Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa melaksanakan tugas menyusun pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang administrasi pengadaan barang/jasa, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang administrasi pengadaan barang/jasa dengan sasarannya adalah meningkatnya efektifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut agar dapat diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional, maka diperlukan indikator dan target kinerja sasaran sebagai tolok ukur untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian setiap sasaran yang telah ditetapkan. Berikut ini adalah rencana kinerja pelayanan jangka menengah Biro Administrasi Pengadaan barang/Jasa SETDA Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan RENSTRA sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Rencana Kinerja Pelayanan Jangka Menengah

| Tujuan | Sasaran | Program | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Target |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Meningkatkan Efektivitas Manajemen Pemerintahan Daerah | Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | Program Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Daerah | Kegiatan Pengkajian dan Standarisasi Pengadaan | Jumlah Dokumen SHB dan ASB | 2 Dokumen |
| | | | Kegiatan Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa | Persentase ketepatan pemaketan dan penjadwalan pengadaan barang/jasa | 100% |
| | | | Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa | Persentase fasilitasi pengadaan barang/jasa | 100% |
| | | | Kegiatan Pengelolaan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik | Persentase Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik yang berjalan optimal | 100% |
| | | | | Persentase Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik yang berjalan sesuai SOP | 100% |
| | | | Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa | Persentase Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa yang berjalan optimal dalam menunjang pelaksanaan pengadaan barang/jasa | 100% |
| | | | | Persentase OPD dan Kabupaten/Kota yang menginput data SIMONTEPRA sesuai kaedah | 71% |
| | | | Kegiatan Pembinaan SDM dan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa | Persentase Peraturan Pengadaan Barang/Jasa yang disosialisasikan | 100% |
| | Kegiatan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa | Persentase Aduan dan Sengketa yang difasilitasi | 100% | | |
| | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Umum, dan Pembinaan ASN di lingkungan Sekretariat Daerah | Program Manajemen, Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah | Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah Bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa | 12 Bulan |
| | | | Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah Bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa | 12 Bulan |
| | | | Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah Bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa | 12 Bulan |

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa telah melakukan perjanjian kinerja dengan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk mewujudkan target kinerja sesuai lampiran PK 2020.

B. RINGKASAN / IKHTISAR PERJANJIAN KINERJA

| NO. (1) | TUJUAN / SASARAN (2) | INDIKATOR KINERJA (3) | TARGET (4) |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|
| Tujuan | | | |
| | Meningkatkan Efektivitas Manajemen Pemerintahan Daerah | Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah | 81 % |
| Sasaran | | | |
| | Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | Efektivitas Pelayanan Pengadaan Barang/ Jasa | 63 % |

Program

| No | Program | Anggaran | Perubahan |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Program Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Daerah | 5.285.000.000,- | 2.438.430.000,- |
| 2 | Program Manajemen, Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah. | 588.000.000,- | 159.524.000,- |
| | Jumlah | 5.873.000.000,- | 2.597.954.000,- |

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progress kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakan.

Kerangka Pengukuran kinerja di Biro APBJ SETDA Provinsi Jawa Tengah dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.1.

Skala Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

| No | SKALA CAPAIAN KINERJA | KATEGORI |
|----|-----------------------|-------------|
| 1 | Lebih dari 100% | Sangat Baik |
| 2 | 75-100% | Baik |
| 3 | 55-74% | Cukup |
| 4 | Kurang dari 55% | Kurang |

Pada tahun 2020, BIRO APBJ telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Biro APBJ SETDA Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 dan Rencana Strategis Biro APBJ SETDA Provinsi Jawa Tengah, sasaran strategis yang harus diwujudkan pada tahun ini, yaitu :

Sasaran : Meningkatnya efektifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengadaan barang/jasa serta meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum, dan pembinaan ASN di lingkungan Sekretariat Daerah.

Indikator yaitu : Jumlah Dokumen SHB dan ASB, Persentase ketepatan pemaketan dan penjadwalan pengadaan barang/jasa, Persentase fasilitas pengadaan barang/jasa, Persentase sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik yang berjalan optimal, Persentase layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik yang berjalan sesuai SOP, Persentase sistem informasi pengadaan barang/jasa yang berjalan optimal dalam menunjang pelaksanaan pengadaan barang/jasa, Persentase OPD dan Kabupaten/Kota yang menginput data SIMONTEPRA sesuai kaedah, Persentase peraturan pengadaan barang/jasa yang disosialisasikan, Persentase aduan dan sengketa yang difasilitasi, Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa, Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan jasa surat menyurat dan kearsipan Biro Adminstrasi Pengadaan Barang/Jasa, Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan makan minum rapat Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa.

Indikator Sasaran : Efektivitas Pelayanan Pengadaan Barang/ Jasa

Tabel 3.2.

Capaian Indikator Sasaran

| Indikator Sasaran | Realisasi Kinerja 2019 | Capaian Kinerja 2019 | Target Kinerja 2020 | Target Kinerja 2020 Perubahan | Realisasi Kinerja 2020 Perubahan | Capaian Kinerja 2020 | Target Realisasi Kinerja 2023 |
|----------------------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| Efektivitas Pelayanan Pengadaan Barang/ Jasa | 96,93 | 161,55% | 63 | 30 | 32 | 106,66% | 70 |

Target awal Persentase Capaian Kinerja Efektivitas Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa tahun 2020 yaitu 63, terjadi refocusing dan rasionalisasi anggaran karena Pandemi Covid-19 sehingga target kinerja menjadi 30 sedangkan yang terealisasi yaitu 32 dengan ketercapaian sebesar 106,66% terhadap target.

Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja pada tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2019 dikarenakan adanya refocusing dan rasionalisasi anggaran terhadap dampak Pandemi Covid-19.

Pencapaian Realisasi Kinerja Tahun 2020 yaitu 32, masih jauh dari Target Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2023 yaitu 70. Biro APBJ akan mengantisipasi meskipun terjadi efisiensi anggaran karena adanya refocusing, tetap dapat terus mengoptimalkan kinerja sehingga Target Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2023 dapat terpenuhi.

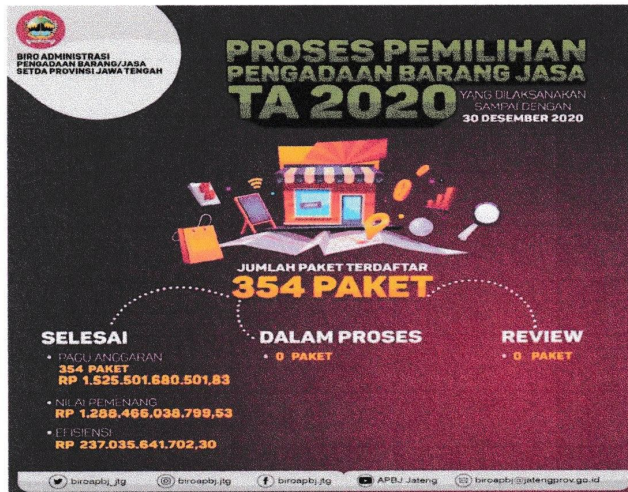
Pada Tahun 2020 Realisasi Kinerja melebihi dari target dikarenakan jumlah paket pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan melebihi jumlah paket pengadaan barang/jasa yang ditargetkan.

Anggaran penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan Capaian Kinerja Efektivitas Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa sebesar Rp. 5.285.000.000,-, mengalami refocusing dan rasionalisasi menjadi Rp. 2.438.430.000,-, dengan realisasi anggaran Rp. 2.411.422.131,-.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro APBJ SETDA Provinsi Jawa Tengah pada tahun anggaran 2020 adapun upaya yang telah dilakukan Biro APBJ SETDA Provinsi Jawa Tengah dalam menjalankan program dan kegiatan, yaitu :

1. Proses Pemilihan Pengadaan Barang Jasa TA 2020.

Gambar 3.1. Proses Pemilihan PBJ TA 2020



Tahun 2020 pada Biro APBJ terdapat 354 paket yang terdaftar, 354 paket berhasil diselesaikan dengan total pagu anggaran Rp. 1.525.501.680.501,83, total nilai pemenang Rp. 1.288.466.038.799,53, dan total efisiensi Rp. 237.035.641.702,30.

2. Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Pengadaan Barang/Jasa Melalui Katalog Elektronik Lokal V.5.0

Dilaksanakan pada tanggal 26 s.d. 27 Februari 2020 bertempat di Hotel Atria Magelang. Narasumber :

- a) LKPP RI oleh Bapak Setya Budi Arijanta dengan materi Proses Pemilihan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa.
- b) LKPP RI oleh Ibu Meleis Susanti dengan materi Katalog Elektronik dan e-Purchasing V.5.0.

3. Bimbingan Teknis Standar Harga Barang/Jasa (e-SHB) yang dilaksanakan secara daring pada tanggal 22 April 2020. Narasumber :

- a) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan materi Materi penyusunan e-SHB satuan biaya honorarium.
- b) Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dengan materi penyusunan e-SHB satuan biaya pengadaan barang dan jasa
- c) Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah dengan materi penyusunan e-SHB satuan biaya pemeliharaan
- d) Tim GRMS (Government Resource Management System) Jawa Tengah dengan materi penerapan dan update aplikasi di GRMS dalam pelaksanaan penerapan e-SHB.

4. Melaksanakan Bimbingan Teknis dan Evaluasi Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2020.

Dilaksanakan pada tanggal 3-4 Februari 2020 bertempat di Hotel "LARAS ASRI" Salatiga, dengan target peserta sebanyak 2 orang/SKPD dari seluruh SKPD Jawa Tengah sebanyak 49 SKPD. Narasumber Bimbingan Teknis tersebut Berasal dari :

- a) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia (LKPP-RI) dengan materi Perencanaan Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa (metode pemilihan melalui Swakelola, Penyedia dan Konsolidasi).
 - b) Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Jawa Tengah dengan Materi Integrasi E-Project Planning dengan SiRup LKPP.
 - c) Desk Pemaketan Pengadaan barang/Jasa yang dilakukan Biro Administrasi Pengadaan barang/Jasa yang dipandu oleh Fungsional Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Tingkat Madya.
5. Pembuatan Sistem Informasi Konsultasi (e-Consult) untuk mendukung proses konsultasi terkait pengadaan barang/jasa dengan Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa untuk mendukung pelayanan di tengah Pandemi COVID-19.

Gambar 3.2. Sistem Informasi Konsultasi (e-Consult)



6. Sosialisasi dan Pelatihan aplikasi SiRUP Lokal bagi PPK dan Admin SPKD di Biro APBJ pada tanggal 12-13 Oktober 2020 dengan jumlah peserta sebanyak 120 orang. Narasumber dari Internal Biro APBJ Setda Provinsi Jawa TengahPelaksanaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa.
7. Pada tahun 2020, data penyedia baru yang teraktivasi di LPSE Prov. Jateng secara Daring sebanyak 355.

Tabel 3.3.

Rekap Penyedia baru teraktivasi di LPSE Provinsi Jawa Tengah
Sampai dengan Tahun 2020
Pelayanan LPSE Secara Daring

| No | Bentuk Usaha | Jumlah |
|----|-----------------------|--------|
| 1 | CV | 124 |
| 2 | PT | 46 |
| 3 | Firma | 1 |
| 4 | Konsultan Perorangan | 10 |
| 5 | Perusahaan Dagang | 2 |
| 6 | Perusahaan Perorangan | 82 |
| 7 | UD | 1 |
| 8 | Pendaftar berproses | 89 |
| | Total | 355 |

Sumber : lpse.jatengprov.go.id

8. Pada Tahun 2020 terdapat 10 Penyedia yang dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

Tabel 3.4.

Daftar Penayangan Pengenaan Sanksi Daftar Hitam Penyedia
Periode Tahun 2020

| No | Penyedia | SK & Tgl Berlaku | Status | Disetujui | Ket |
|----|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|-----|
| 1 | CV.PUTRI WIJAYANTI PUTRIWIJAYANTI.CV | PA/KPA RSUD Margono Soekarjo Purwokerto Nomor : 027/1045/X/2020; Tanggal 05 Okt 2020 Tanggal Berlaku: 5 Okt 2020 - 5 Okt 2021 | Tayang | 14 Okt 2020 11:38 | √ |
| 2 | CV.AURORA AURORA_CV | PA/KPA Dinas Pertanian dan Perkebunan 521.23/916/2019 Tanggal Berlaku: 11 Okt 2019 - 11 Okt 2020 | Habis Masa Berlaku | 17 Feb 2020 09:46 | √ |
| 3 | PT. BANGUN GUMELAR JAYA BANGUNGUMELARJAYA | PA/KPA Dinas PU BMCK 522.371/969 Tanggal Berlaku: 6 Feb 2020 - 6 Feb 2021 | Tayang | - | √ |
| 4 | PT. BANGUN GUMELAR JAYA BANGUNGUMELARJAYA | PA/KPA Dinas PU BMCK 522.371/969 Tanggal Berlaku: 6 Feb 2020 - 6 Feb 2021 | Tayang | 11 Feb 2020 08:04 | √ |
| 5 | CV. NABILA ABADI JAYA NABILA_AJ | PA/KPA Dinas PU BMCK 027/669 Tanggal Berlaku: 30 Jan 2020 - 30 Jan 2021 | Tayang | 4 Feb 2020 11:37 | √ |
| 6 | CV. WAHANA PEMBANGUNAN WAHANAPEMBANGUNAN | PA/KPA Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 524/167 Tanggal Berlaku: 20 Jan 2020 - 20 Jan 2021 | Habis Masa Berlaku | 30 Jan 2020 12:22 | |
| 7 | PT. INA HASTA MANDIRI INAHASTAMANDIRI | PA/KPA Dinas PU BMCK 620/10.932 Tahun 2019 Tanggal Berlaku: 21 Nov 2019 - 21 Nov 2020 | Habis Masa Berlaku | 25 Nov 2019 10:19 | |
| 8 | CV.Ragil Jaya RAJASAPI | PA/KPA Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 027/140/BBPTT/X/2019 Tanggal Berlaku: 4 Okt 2019 - 4 Okt 2020 | Habis Masa Berlaku | 25 Okt 2019 15:26 | |
| 9 | CV. MITRA PERSADA MITRACV007 | PA/KPA Dinas PU BMCK 027/5141 Tanggal Berlaku: 24 Jun 2019 - 24 Jun 2020 | Habis Masa Berlaku | 25 Jun 2019 10:35 | |
| 10 | CV. SURYA PUTRA KENANGA CV_SURYAPUTRAKENANGA | PA/KPA Dinas PU BMCK 027/5141 Tanggal Berlaku: 24 Jun 2019 - 24 Jun 2020 | Habis Masa Berlaku | 25 Jun 2019 09:29 | |

Sumber : Inaproc.id

9. Hasil capaian Terpenuhinya Standarisasi Layanan LPSE : 2014 pada LPSE se Jawa Tengah.

Tabel 3.5.

Perolehan Standarisasi LPSE : 2014 Tahun 2020

| NO | ID | LPSE / PROVINSI | STANDARDISASI | PARTISIPASI KEGIATAN |
|----|----|-----------------|---------------|-------------------------|
|----|----|-----------------|---------------|-------------------------|

| | | | | |
|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|
| 1. | 51 | LPSE Kabupaten Klaten Jawa Tengah Diperbarui pada 22 Jan 2021 | Ya <u>10</u> | Ya <u>6 Orang 6 Kegiatan</u> |
| 2. | 53 | LPSE Kabupaten Kebumen Jawa Tengah Diperbarui pada 22 Jan 2021 | Ya <u>5</u> | Ya <u>6 Orang 6 Kegiatan</u> |
| 3. | 60 | LPSE Kabupaten Banyumas Jawa Tengah Diperbarui pada 22 Jan 2021 | Ya <u>11</u> | Ya <u>10 Orang 8 Kegiatan</u> |
| 4. | 90 | LPSE Kabupaten Pemalang Jawa Tengah Diperbarui pada 22 Jan 2021 | Ya <u>9</u> | Ya <u>8 Orang 9 Kegiatan</u> |
| 5. | 91 | LPSE Kota Pekalongan Jawa Tengah Diperbarui pada 22 Jan 2021 | Ya <u>11</u> | Ya <u>8 Orang 8 Kegiatan</u> |
| 6. | 637 | LPSE Universitas Negeri Sebelas Maret Jawa Tengah Diperbarui pada 22 Jan 2021 | Ya <u>4</u> | Tidak <u>0 Orang 0 Kegiatan</u> |
| 7. | 146 | LPSE Kabupaten Purworejo Jawa Tengah Diperbarui pada 22 Jan 2021 | Ya <u>9</u> | Ya <u>6 Orang 6 Kegiatan</u> |
| 8. | 148 | LPSE Kabupaten Brebes Jawa Tengah Diperbarui pada 22 Jan 2021 | Ya <u>9</u> | Ya <u>6 Orang 7 Kegiatan</u> |
| 9. | 160 | LPSE Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah Diperbarui pada 22 Jan 2021 | Ya <u>12</u> | Ya <u>3 Orang 4 Kegiatan</u> |
| 10. | 202 | LPSE Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah Diperbarui pada 22 Jan 2021 | Ya <u>12</u> | Ya <u>11 Orang 14 Kegiatan</u> |
| 11. | 209 | LPSE Kabupaten Batang Jawa Tengah Diperbarui pada 22 Jan 2021 | Ya <u>6</u> | Ya <u>7 Orang 6 Kegiatan</u> |
| 12. | 228 | LPSE Kabupaten Sragen Jawa Tengah Diperbarui pada 22 Jan 2021 | Ya <u>12</u> | Ya <u>4 Orang 3 Kegiatan</u> |
| 13. | 257 | LPSE Kabupaten Blora Jawa Tengah Diperbarui pada 22 Jan 2021 | Ya <u>4</u> | Ya <u>5 Orang 7 Kegiatan</u> |
| 14. | 29 | LPSE Universitas Diponegoro Jawa Tengah Diperbarui pada 22 Jan 2021 | Ya <u>5</u> | Ya <u>5 Orang 4 Kegiatan</u> |
| 15. | 286 | LPSE Kabupaten Cilacap Jawa Tengah Diperbarui pada 22 Jan 2021 | Ya <u>6</u> | Ya <u>5 Orang 11 Kegiatan</u> |
| 16. | 287 | LPSE Kabupaten Tegal Jawa Tengah Diperbarui pada 22 Jan 2021 | Ya <u>12</u> | Ya <u>8 Orang 10 Kegiatan</u> |
| 17. | 569 | LPSE Polda Jawa Tengah Jawa Tengah Diperbarui pada 22 Jan 2021 | Tidak <u>0</u> | Tidak <u>0 Orang 0 Kegiatan</u> |
| 18. | 314 | LPSE Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah Diperbarui pada 22 Jan 2021 | Ya <u>8</u> | Ya <u>13 Orang 13 Kegiatan</u> |

| | | | | |
|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------|
| 19. | 138 | LPSE Kabupaten Temanggung Jawa Tengah Diperbarui pada 22 Jan 2021 | Ya 3 | Ya 4 Orang 4 Kegiatan |
| 20. | 141 | LPSE Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah Diperbarui pada 22 Jan 2021 | Ya 12 | Ya 5 Orang 6 Kegiatan |
| 21. | 423 | LPSE Kabupaten Demak Jawa Tengah Diperbarui pada 22 Jan 2021 | Ya 9 | Ya 3 Orang 2 Kegiatan |
| 22. | 220 | LPSE Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah Diperbarui pada 22 Jan 2021 | Ya 4 | Ya 5 Orang 6 Kegiatan |
| 23. | 279 | LPSE Kota Magelang Jawa Tengah Diperbarui pada 22 Jan 2021 | Ya 12 | Ya 4 Orang 9 Kegiatan |
| 24. | 280 | LPSE Kabupaten Boyolali Jawa Tengah Diperbarui pada 22 Jan 2021 | Ya 12 | Ya 7 Orang 10 Kegiatan |
| 25. | 32 | LPSE Kabupaten Semarang Jawa Tengah Diperbarui pada 22 Jan 2021 | Ya 6 | Ya 8 Orang 11 Kegiatan |
| 26. | 42 | LPSE Provinsi Jawa Tengah Jawa Tengah Diperbarui pada 22 Jan 2021 | Ya 17 | Ya 20 Orang 16 Kegiatan |
| 27. | 48 | LPSE Kota Tegal Jawa Tengah Diperbarui pada 22 Jan 2021 | Ya 10 | Ya 4 Orang 9 Kegiatan |
| 28. | 334 | LPSE Kabupaten Pati Jawa Tengah Diperbarui pada 22 Jan 2021 | Ya 12 | Ya 8 Orang 13 Kegiatan |
| 29. | 88 | LPSE Kota Salatiga Jawa Tengah Diperbarui pada 22 Jan 2021 | Ya 8 | Ya 4 Orang 6 Kegiatan |
| 30. | 94 | LPSE Kabupaten Kudus Jawa Tengah Diperbarui pada 22 Jan 2021 | Ya 12 | Ya 10 Orang 11 Kegiatan |
| 31. | 104 | LPSE Kota Surakarta Jawa Tengah Diperbarui pada 22 Jan 2021 | Ya 12 | Ya 10 Orang 9 Kegiatan |
| 32. | 108 | LPSE Kota Semarang Jawa Tengah Diperbarui pada 22 Jan 2021 | Ya 12 | Ya 7 Orang 4 Kegiatan |
| 33. | 115 | LPSE Kabupaten Magelang Jawa Tengah Diperbarui pada 22 Jan 2021 | Ya 10 | Ya 2 Orang 3 Kegiatan |
| 34. | 129 | LPSE Kabupaten Banjarnegara Jawa Tengah Diperbarui pada 22 Jan 2021 | Ya 6 | Ya 8 Orang 9 Kegiatan |
| 35. | 140 | LPSE Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah Diperbarui pada 22 Jan 2021 | Ya 8 | Ya 6 Orang 4 Kegiatan |
| 36. | 182 | LPSE Kabupaten Jepara Jawa Tengah Diperbarui pada 22 Jan 2021 | Ya 3 | Ya 5 Orang 4 Kegiatan |

| | | | | |
|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|
| 37. | 211 | LPSE Kabupaten Grobogan Jawa Tengah Diperbarui pada 22 Jan 2021 | Ya 9 | Ya 3 Orang 9 Kegiatan |
| 38. | 227 | LPSE Universitas Jenderal Soedirman Jawa Tengah Diperbarui pada 22 Jan 2021 | Ya 3 | Ya 4 Orang 1 Kegiatan |
| 39. | 501 | LPSE Kabupaten Kendal Jawa Tengah Diperbarui pada 22 Jan 2021 | Ya 8 | Ya 13 Orang 9 Kegiatan |
| 40. | 375 | LPSE Kabupaten Rembang (Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang Bagian Pengadaan Barang/Jasa) Jawa Tengah Diperbarui pada 22 Jan 2021 | Ya 8 | Tidak 0 Orang 0 Kegiatan |

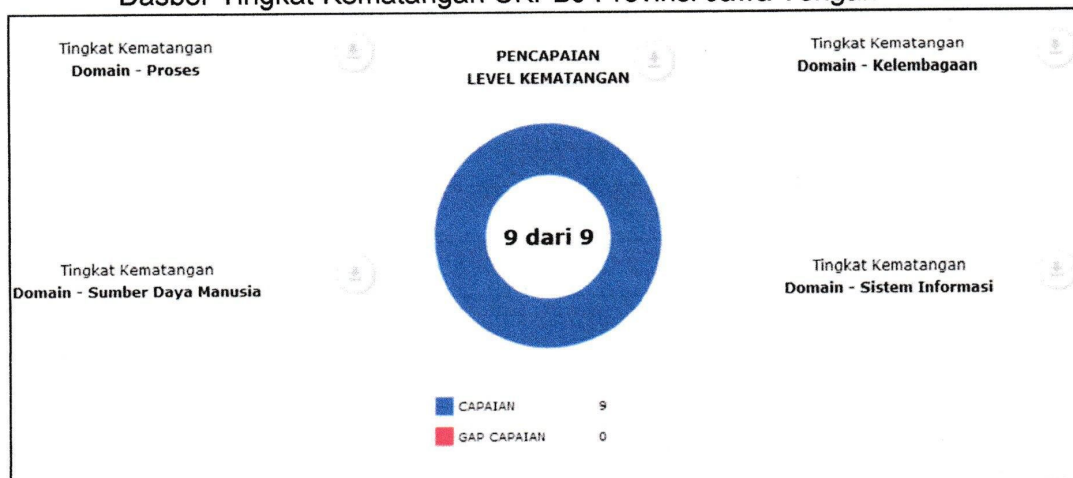
Sumber : eproc.lkpp.go.id

10. Bimbingan Teknis Pelaksanaan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa dan Penyusunan Dokumen Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa. Dilaksanakan pada tanggal 9 Maret 2020 bertempat di Gedung E, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Jl. Pahlawan No 9 Semarang. Dengan target peserta sebanyak 50 orang berasal dari Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Jawa Tengah. Narasumber Rakor Berasal dari : Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan (Bpk, Samsul, S.Sos. - NIP. 197507172006041016).

11. Tingkat kematangan UKPBJ Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2020

Gambar 3.3.

Dasbor Tingkat Kematangan UKPBJ Provinsi Jawa Tengah



Sumber : siukpbj.lkpp.go.id

Gambar 3.4. Tingkat Kematangan Organisasi UKPBJ Prov Jateng

| Hasil Pengisian Penilaian Mandiri Tingkat Kematangan Organisasi UKPBJ PROVINSI JAWA TENGAH | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------|
| Domain | Variabel | Key Drivers | Kriteria Pusat Keunggulan | Tingkat Kematangan Saat Ini | File Bukti Dukung |
| Proses | 1.1 Manajemen Pengadaan | Proses pengadaan terintegrasi mulai dari proses perencanaan pengadaan sampai dengan pelaksanaan kontrak. Memastikan keamanan & keberlangsungan layanan pengadaan secara elektronik | 3 | 3 | Unduh Bukti Dukung |
| | 1.2 Manajemen Penyedia | Tersedianya program pembinaan kepada penyedia guna memastikan keberhasilan proses pemilihan dan pelaksanaan kontrak | 3 | 3 | Unduh Bukti Dukung |
| | 1.3 Manajemen Kinerja | Penerapan pengelolaan kinerja secara terstruktur dengan menggunakan IKU UKPBJ yang mendukung efisiensi proses pengadaan | 3 | 4 | Unduh Bukti Dukung |
| | 1.4 Manajemen Risiko | Sudah diterapkan kode etik untuk para pengelola UKPBJ. Siklus manajemen risiko diterapkan untuk mendukung proses pemilihan dan pelaksanaan kontrak | 3 | 3 | Unduh Bukti Dukung |
| Kelembagaan | 2.1 Pengorganisasian | Organisasi UKPBJ untuk pemenuhan kebutuhan pelanggan | 3 | 4 | Unduh Bukti Dukung |
| | 2.2 Tugas dan Fungsi | Pendampingan perencanaan pengadaan, Proses pemilihan, pendampingan pelaksanaan kontrak, Pembinaan SDM dan kelembagaan UKPBJ, Pembinaan SDM PBJ, Layanan pengadaan secara elektronik | 3 | 3 | Unduh Bukti Dukung |
| SDM | 3.1 Perencanaan SDM | Sudah dilakukan Anjab dan ABK berbasis data paket pengadaan tahun lalu serta perluasan peran UKPBJ untuk seluruh personil UKPBJ | 3 | 4 | Unduh Bukti Dukung |
| | 3.2 Pengembangan SDM | Program pelatihan dan mentoring kompetensi pengadaan berbasis Standar Kompetensi Jabatan PBJP, Kompetensi Personil UKPBJ, Kompetensi Pengelolaan Kelembagaan UKPBJ | 3 | 3 | Unduh Bukti Dukung |
| Sistem Informasi | 4.1 Sistem Informasi | Penggunaan sistem yang mengintegrasikan mata rantai proses PBJ di tahap perencanaan, persiapan, pemilihan dan pelaksanaan kontrak | 3 | 3 | Unduh Bukti Dukung |

Sumber : siukpbj.lkpp.go.id

12. Rapat Koordinasi Tim Layanan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020. Dilaksanakan pada tanggal :
 - a) 19 Februari 2020 bertempat di Gedung D Lantai IV, pada Biro APBJ SETDA Prov. Jateng.
 - b) 19 Mei 2020 bertempat di Gedung D Lantai IV, pada Biro APBJ SETDA Prov. Jateng.
 - c) 22 Oktober 2020 bertempat di Gedung D Lantai IV, pada Biro APBJ SETDA Prov. Jateng.
 - d) 30 November 2020 bertempat di Gedung D Lantai IV, pada Biro APBJ SETDA Prov. Jateng.
13. Pendampingan Permasalahan Hukum Tahun 2020
 - a) Permintaan Keterangan dan Dokumen dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Direktorat Reserse Kriminal Khusus untuk menindaklanjuti Laporan Informasi tentang dugaan tindak pidana korupsi pada paket pekerjaan Konstruksi Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Kesehatan – Biaya Pembangunan Gedung Rawat Inap 5 (lima) Lantai Tahap II RSJD Surakarta TA 2018 terhadap Pokja 1 pada tanggal 27 Februari 2020. Hasil pemeriksaan dari pengumpulan barang bukti dan keterangan oleh penyidik masih belum final. Jadi masih menunggu informasi selanjutnya dari penyidik.

- b) Permintaan Keterangan Klarifikasi dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Direktorat Reserse Kriminal Khusus untuk menindaklanjuti Laporan Informasi tentang dugaan tindak pidana membuat surat palsu atau memalsukan surat dan atau menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam akta autentik terkait dokumen lelang pelaksanaan tender Pembangunan Flyover Ganefo (Mranggen) Ruas Semarang-Godong (Kab. Demak) terhadap Pokja Pemilihan 8.1 pada tanggal 7 September 2020. Berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata tidak diketemukan adanya unsur pidana, hanya terdapat kesalahan administratif, sehingga untuk tindaklanjutnya oleh penyidik diserahkan kepada Inspektorat.
- c) Permintaan Keterangan dan Dokumen dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Direktorat Reserse Kriminal Khusus untuk menindaklanjuti Laporan Informasi tentang dugaan tindak pidana korupsi di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Jateng pada paket paket Pembangunan Kandang ayam Close House TA 2019 pada Pokja Pemilihan 11 dan paket Pengadaan Alat-Alat Peternakan TA 2019 pada Pokja Pemilihan 13 pada tanggal 28 September 2020. Hasil pemeriksaan dari pengumpulan barang bukti dan keterangan oleh penyidik masih belum final. Jadi masih menunggu informasi selanjutnya dari penyidik.

B. REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro APBJ SETDA Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 pada Program Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Daerah, didukung dengan anggaran awal sebesar Rp. 5.873.000.000,- (lima milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) dan sesudah refocusing sebesar Rp. 2.597.954.000,- (dua milyar lima ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.6. Realisasi Anggaran Program
Biro APBJ SETDA Prov. Jateng 2020

| No | Program | Anggaran | Perubahan |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Program Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Daerah | 5.285.000.000,- | 2.438.430.000,- |
| 2 | Program Manajemen, Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah. | 588.000.000,- | 159.524.000,- |
| | Jumlah | 5.873.000.000,- | 2.597.954.000,- |

Penggunaan anggaran tersebut apabila diperinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 3.7. Realisasi Anggaran Biro APBJ SETDA Prov. Jateng 2020

| Sasaran | Program | No. | Kegiatan | Anggaran Sebelum Refocusing | Refocusing 1 | Refocusing 2 | Total Refocusing | Anggaran Setelah Refocusing | Realisasi (Rp.) | Persentase (%) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|----------------|
| Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Daerah | 1 | Kegiatan Pengkajian dan Standarisasi | 800.000.000 | 192.921.000 | 202.896.000 | 395.817.000 | 404.183.000 | 403.181.982 | 99,75 |
| | | 2 | Kegiatan Perencanaan PBJ | 600.000.000 | 165.451.000 | 165.138.000 | 330.589.000 | 269.411.000 | 256.764.269 | 95,31 |
| | | 3 | Kegiatan Pelaksanaan PBJ | 1.350.000.000 | 487.200.000 | 259.998.000 | 747.198.000 | 602.802.000 | 601.143.943 | 99,72 |
| | | 4 | Kegiatan LPSE | 550.000.000 | 171.536.000 | 233.458.000 | 404.994.000 | 145.006.000 | 144.909.349 | 99,93 |
| | | 5 | Kegiatan SIPBJ | 985.000.000 | 186.187.000 | 293.124.000 | 479.311.000 | 505.689.000 | 501.615.564 | 99,19 |
| | | 6 | Kegiatan Pembinaan SDM dan Kelembagaan PBJ | 350.000.000 | 77.831.000 | 80.580.000 | 158.411.000 | 191.589.000 | 190.412.847 | 99,39 |
| | | 7 | Kegiatan Advokasi PBJ | 650.000.000 | 147.950.000 | 182.300.000 | 330.250.000 | 319.750.000 | 313.394.177 | 98,01 |
| Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Umum, dan Pembinaan ASN di Lingkungan Sekretariat Daerah | Program Manajemen, Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah | 8 | Kegiatan Surat Menyurat | 45.000.000 | 18.000.000 | 15.654.000 | 33.654.000 | 11.346.000 | 11.230.129 | 98,98 |
| | | 9 | Kegiatan Penyediaan Makan Minum Rapat | 35.000.000 | 14.000.000 | - | 14.000.000 | 21.000.000 | 21.000.000 | 100,00 |
| | | 10 | Kegiatan Rapat Koordinasi DD dan LD | 508.000.000 | 203.200.000 | 177.622.000 | 380.822.000 | 127.178.000 | 126.957.754 | 99,83 |
| | | | TOTAL | 5.873.000.000 | 1.664.276.000 | 1.610.770.000 | 3.275.046.000 | 2.597.954.000 | 2.570.610.014 | 98,95 |

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Untuk mewujudkan Efektivitas Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa di Provinsi Jawa Tengah, maka Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa terdiri dari 2 Program yaitu Program Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Daerah dengan 3 indikator Program yaitu: Persentase Keberhasilan Pengadaan Barang/Jasa, Persentase Efektivitas Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa, Persentase Aduan dan Sengketa yang tertangani. Program kedua adalah Program Manajemen, Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah dengan Indikator Program yaitu: Persentase Pelayanan Administrasi Umum.

Anggaran penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Daerah sebesar Rp. 5.285.000.000,- dan sesudah Rasionalisasi sebesar Rp. 2.438.430.000,-, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Untuk mendukung Indikator Persentase Keberhasilan Pengadaan Barang/Jasa, Anggaran Awal sebesar Rp. 2.750.000.000,- Menjadi Rp. 1.276.396.000,-.
2. Untuk Mendukung Indikator Persentase Efektivitas Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa Anggaran Awal sebesar Rp. 1.535.000.000,- Menjadi Rp. 650.695.000,-.
3. Untuk Mendukung Indikator Persentase Aduan dan Sengketa yang tertangani Anggaran Awal sebesar Rp. 1.000.000.000,- menjadi Rp. 511.339.000,-.

Sedangkan untuk capaian Program Manajemen, Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah sebesar Rp. 588.000.000,- dan sesudah Rasionalisasi sebesar Rp. 159.524.000,-.

Berdasarkan pengukuran kinerja dan anggaran Biro APBJ SETDA Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2020 untuk realisasi Capaian Indikator Sasaran Target Kinerja Tahun 2020 telah berhasil melampaui target. Target awal Persentase Capaian Kinerja Efektivitas Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa tahun 2020 yaitu 63, terjadi refocusing dan rasionalisasi anggaran karena Pandemi Covid-19 sehingga target kinerja menjadi 30 sedangkan yang terealisasi yaitu 32 dikarenakan jumlah paket pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan melebihi jumlah paket pengadaan barang/jasa yang ditargetkan dengan ketercapaian sebesar 106,66% terhadap target dengan skala capaian kinerja "Sangat Baik".

B. SARAN DAN MASUKAN

Dalam Laporan Tahun 2020 ini masih banyak kegiatan-kegiatan yang perlu di tingkatkan pada tahun-tahun berikutnya.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam upaya peningkatan kinerja, antara lain:

1. Perlunya peningkatan pola komunikasi dan sinergi dari semua ASN di Biro APBJ SETDA Provinsi Jawa Tengah.
2. Perlunya untuk selalu meningkatkan profesionalisme dan menjaga integritas.
3. Perlunya tindakan antisipasi terhadap adanya kebijakan refocusing terhadap anggaran sehingga tidak mengganggu target kinerja setelah ditetapkan.

Semoga laporan tahun 2020 ini dapat menjadikan bahan atau landasan dalam menetapkan dan meningkatkan kualitas kinerja Biro APBJ SETDA Provinsi Jawa Tengah di masa mendatang.

Semarang,

2021

KEPALA BIRO ADMINISTRASI
PENGADAAN BARANG/JASA SETDA
PROVINSI JAWA TENGAH,



Ir. YUNI ASTUTI, MA
Pembina Utama Madya
NIP. 19620621 198709 2 001

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. PERJANJIAN KINERJA



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pahlawan No. 9 Telpn 8311174 (20 saluran) Fax. 8311266
Semarang 50243

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. YUNI ASTUTI, MA
Jabatan : Kepala Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi
Jawa Tengah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HERRU SETIADHIE, SH, M.Si
Jabatan : Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 2020

Pihak Kedua,
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

Pihak Pertama,
KEPALA BIRO ADMINISTRASI
PENGADAAN BARANG/JASA


HERRU SETIADHIE, SH, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19601014 198903 1 002


Ir. YUNI ASTUTI, MA
Pembina Utama Madya
NIP. 19620621 198709 2 001


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
BIRO ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG/JASA

| NO. | TUJUAN / SASARAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| Tujuan | | | |
| | Meningkatkan Efektivitas Manajemen Pemerintahan Daerah | Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah | 81 % |
| Sasaran | | | |
| | Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | Efektivitas Pelayanan Pengadaan Barang/ Jasa | 63 % |

| Program | Anggaran | Keterangan |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|
| 1. Program Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Daerah | Rp. 5.285.000.000,- | APBD |
| 2. Program Manajemen, Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah | Rp. 588.000.000,- | APBD |

Semarang, 2020

Pihak Kedua
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH


HERRU SETIADHIE, SH, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19601014 198903 1 002

Pihak Pertama
KEPALA BIRO ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG/JASA
SETDA PROVINSI JAWA TENGAH


Ir. YUNI ASTUTI, MA
Pembina Utama Madya
NIP. 19620621 198709 2 001

B. LRA



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN
(SPJ BELANJA - ADMINISTRATIF)

per 17 Februari 2021

SKPD : Sekretariat Daerah - Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa
KUASA PENGGUNA ANGGARAN : Ir. YUNI ASTUTI, MA
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU : GINANJAR AVRI ADIANTANTO, A.Md
BULAN : Desember 2020

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah Anggaran (Rp) | SPJ- LS Gaji (Rp) | | | SPJ- LS Barang & Jasa (Rp) | | | SPJ- GU/TU (Rp) | | | Jumlah SPJ (LS+ GU/TU) s.d. Bulan ini (Rp) | Sisa Pagu Anggaran (Rp) |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-----------|----------------|----------------------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|----------------|--------------------------------------------|-------------------------|
| | | | s.d. Bulan Lalu | Bulan Ini | s.d. Bulan Ini | s.d. Bulan Lalu | Bulan Ini | s.d. Bulan Ini | s.d. Bulan Lalu | Bulan Ini | s.d. Bulan Ini | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(4+5) | 7 | 8 | 9(7+8) | 10 | 11 | 12 (10+11) | 13 (6+9+12) | 14 |
| 4.06.4.06.03.00.00.5.2 | BELANJA LANGSUNG | 2.597.954.000 | 0 | 0 | 0 | 108.680.000 | 0 | 108.680.000 | 2.228.748.104 | 233.181.910 | 2.461.930.014 | 2.570.610.014 | 27.343.986 |
| 4.06.4.06.03.09.01 | Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah | 159.524.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.887.883 | 300.000 | 159.187.883 | 159.187.883 | 336.117 |
| 4.06.4.06.03.09.01.0002 | Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah | 11.346.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.230.129 | 0 | 11.230.129 | 11.230.129 | 115.871 |
| 4.06.4.06.03.09.01.0002.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 11.346.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.230.129 | 0 | 11.230.129 | 11.230.129 | 115.871 |
| 4.06.4.06.03.09.01.0002.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 6.606.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.490.129 | 0 | 6.490.129 | 6.490.129 | 115.871 |
| 4.06.4.06.03.09.01.0002.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 6.606.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.490.129 | 0 | 6.490.129 | 6.490.129 | 115.871 |
| 4.06.4.06.03.09.01.0002.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 4.740.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.740.000 | 0 | 4.740.000 | 4.740.000 | 0 |
| 4.06.4.06.03.09.01.0002.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 4.740.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.740.000 | 0 | 4.740.000 | 4.740.000 | 0 |
| 4.06.4.06.03.09.01.0006 | Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah | 127.178.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.957.754 | 0 | 126.957.754 | 126.957.754 | 220.246 |
| 4.06.4.06.03.09.01.0006.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 127.178.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.957.754 | 0 | 126.957.754 | 126.957.754 | 220.246 |
| 4.06.4.06.03.09.01.0006.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 127.178.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.957.754 | 0 | 126.957.754 | 126.957.754 | 220.246 |
| 4.06.4.06.03.09.01.0006.5.2.2.15.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 75.994.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.888.464 | 0 | 75.888.464 | 75.888.464 | 105.536 |
| 4.06.4.06.03.09.01.0006.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 51.184.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.069.290 | 0 | 51.069.290 | 51.069.290 | 114.710 |
| 4.06.4.06.03.09.01.0007 | Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah | 21.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.700.000 | 300.000 | 21.000.000 | 21.000.000 | 0 |
| 4.06.4.06.03.09.01.0007.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 21.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.700.000 | 300.000 | 21.000.000 | 21.000.000 | 0 |
| 4.06.4.06.03.09.01.0007.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 21.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.700.000 | 300.000 | 21.000.000 | 21.000.000 | 0 |
| 4.06.4.06.03.09.01.0007.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 21.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.700.000 | 300.000 | 21.000.000 | 21.000.000 | 0 |
| 4.06.4.06.03.09.17 | Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Daerah | 2.438.430.000 | 0 | 0 | 0 | 108.680.000 | 0 | 108.680.000 | 2.069.860.221 | 232.881.910 | 2.302.742.131 | 2.411.422.131 | 27.007.869 |
| 4.06.4.06.03.09.17.0042 | Kegiatan Pengkajian dan Standarisasi Pengadaan | 404.183.000 | 0 | 0 | 0 | 59.180.000 | 0 | 59.180.000 | 343.631.982 | 370.000 | 344.001.982 | 403.181.982 | 1.001.018 |
| 4.06.4.06.03.09.17.0042.5.2.1 | Belanja Pegawai | 217.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.600.000 | 0 | 217.600.000 | 217.600.000 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 4.06.4.06.03.09.17.0042.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 217.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.600.000 | 0 | 217.600.000 | 217.600.000 | 0 |
| 4.06.4.06.03.09.17.0042.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 216.700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.700.000 | 0 | 216.700.000 | 216.700.000 | 0 |
| 4.06.4.06.03.09.17.0042.5.2.1.01.02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa | 900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900.000 | 0 | 900.000 | 900.000 | 0 |
| 4.06.4.06.03.09.17.0042.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 186.583.000 | 0 | 0 | 0 | 59.180.000 | 0 | 59.180.000 | 126.031.982 | 370.000 | 126.401.982 | 185.581.982 | 1.001.018 |
| 4.06.4.06.03.09.17.0042.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 24.273.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.860.682 | 0 | 23.860.682 | 23.860.682 | 412.318 |
| 4.06.4.06.03.09.17.0042.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 5.383.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.330.682 | 0 | 5.330.682 | 5.330.682 | 52.318 |
| 4.06.4.06.03.09.17.0042.5.2.2.01.04 | Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.000 | 0 | 180.000 | 180.000 | 0 |
| 4.06.4.06.03.09.17.0042.5.2.2.01.16 | Belanja Dekorasi/Dokumentasi | 1.110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750.000 | 0 | 750.000 | 750.000 | 360.000 |
| 4.06.4.06.03.09.17.0042.5.2.2.01.21 | Belanja Perlengkapan Diklat/Seminar/Bintek/Sosialisasi/Lokakarya | 17.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.600.000 | 0 | 17.600.000 | 17.600.000 | 0 |
| 4.06.4.06.03.09.17.0042.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 9.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.400.000 | 0 | 9.400.000 | 9.400.000 | 0 |
| 4.06.4.06.03.09.17.0042.5.2.2.03.20 | Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli | 9.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.400.000 | 0 | 9.400.000 | 9.400.000 | 0 |
| 4.06.4.06.03.09.17.0042.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 4.668.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.608.000 | 0 | 4.608.000 | 4.608.000 | 60.000 |
| 4.06.4.06.03.09.17.0042.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.440.000 | 0 | 1.440.000 | 1.440.000 | 60.000 |
| 4.06.4.06.03.09.17.0042.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 3.168.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.168.000 | 0 | 3.168.000 | 3.168.000 | 0 |
| 4.06.4.06.03.09.17.0042.5.2.2.07 | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 59.400.000 | 0 | 0 | 0 | 59.180.000 | 0 | 59.180.000 | 0 | 0 | 0 | 59.180.000 | 220.000 |
| 4.06.4.06.03.09.17.0042.5.2.2.07.07 | Belanja Sewa Hotel | 59.400.000 | 0 | 0 | 0 | 59.180.000 | 0 | 59.180.000 | 0 | 0 | 0 | 59.180.000 | 220.000 |
| 4.06.4.06.03.09.17.0042.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 7.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.200.000 | 0 | 7.200.000 | 7.200.000 | 0 |
| 4.06.4.06.03.09.17.0042.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 7.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.200.000 | 0 | 7.200.000 | 7.200.000 | 0 |
| 4.06.4.06.03.09.17.0042.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 81.642.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.963.300 | 370.000 | 81.333.300 | 81.333.300 | 308.700 |
| 4.06.4.06.03.09.17.0042.5.2.2.15.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 41.023.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.357.900 | 370.000 | 40.727.900 | 40.727.900 | 295.100 |
| 4.06.4.06.03.09.17.0042.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 40.619.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.605.400 | 0 | 40.605.400 | 40.605.400 | 13.600 |
| 4.06.4.06.03.09.17.0042.5.2.2.21 | Belanja Jasa Konsultansi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.06.4.06.03.09.17.0042.5.2.2.21.05 | Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.06.4.06.03.09.17.0043 | Kegiatan Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa | 269.411.000 | 0 | 0 | 0 | 49.500.000 | 0 | 49.500.000 | 184.737.769 | 22.526.500 | 207.264.269 | 256.764.269 | 12.646.731 |
| 4.06.4.06.03.09.17.0043.5.2.1 | Belanja Pegawai | 900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900.000 | 0 | 900.000 | 900.000 | 0 |
| 4.06.4.06.03.09.17.0043.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900.000 | 0 | 900.000 | 900.000 | 0 |
| 4.06.4.06.03.09.17.0043.5.2.1.01.02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa | 900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900.000 | 0 | 900.000 | 900.000 | 0 |
| 4.06.4.06.03.09.17.0043.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 268.511.000 | 0 | 0 | 0 | 49.500.000 | 0 | 49.500.000 | 183.837.769 | 22.526.500 | 206.364.269 | 255.864.269 | 12.646.731 |
| 4.06.4.06.03.09.17.0043.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 13.118.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.023.111 | 0 | 13.023.111 | 13.023.111 | 94.889 |
| 4.06.4.06.03.09.17.0043.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 4.758.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.663.111 | 0 | 4.663.111 | 4.663.111 | 94.889 |
| 4.06.4.06.03.09.17.0043.5.2.2.01.04 | Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya | 360.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.000 | 0 | 360.000 | 360.000 | 0 |
| 4.06.4.06.03.09.17.0043.5.2.2.01.21 | Belanja Perlengkapan Diklat/Seminar/Bintek/Sosialisasi/Lokakarya | 8.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 8.000.000 | 0 |
| 4.06.4.06.03.09.17.0043.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 132.700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.200.000 | 10.500.000 | 132.700.000 | 132.700.000 | 0 |
| 4.06.4.06.03.09.17.0043.5.2.2.03.07 | Belanja Paket/Pengiriman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.06.4.06.03.09.17.0043.5.2.2.03.20 | Belanja Jasa | 6.700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.700.000 | 0 | 6.700.000 | 6.700.000 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--|
| | Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli | | | | | | | | | | | | | |
| 4.06.4.06.03.09.17.0043.5.2.2.03.32 | Belanja Jasa Tenaga Teknis | 126.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.500.000 | 10.500.000 | 126.000.000 | 126.000.000 | 0 | |
| 4.06.4.06.03.09.17.0043.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 400.000 | 400.000 | 0 | |
| 4.06.4.06.03.09.17.0043.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 400.000 | 400.000 | 0 | |
| 4.06.4.06.03.09.17.0043.5.2.2.07 | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 49.500.000 | 0 | 0 | 0 | 49.500.000 | 0 | 49.500.000 | 0 | 0 | 0 | 49.500.000 | 0 | |
| 4.06.4.06.03.09.17.0043.5.2.2.07.07 | Belanja Sewa Hotel | 49.500.000 | 0 | 0 | 0 | 49.500.000 | 0 | 49.500.000 | 0 | 0 | 0 | 49.500.000 | 0 | |
| 4.06.4.06.03.09.17.0043.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 3.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.750.000 | 320.000 | 3.070.000 | 3.070.000 | 30.000 | |
| 4.06.4.06.03.09.17.0043.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 3.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.750.000 | 320.000 | 3.070.000 | 3.070.000 | 30.000 | |
| 4.06.4.06.03.09.17.0043.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 69.693.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.464.658 | 11.706.500 | 57.171.158 | 57.171.158 | 12.521.842 | |
| 4.06.4.06.03.09.17.0043.5.2.2.15.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 41.703.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.990.658 | 11.706.500 | 41.697.158 | 41.697.158 | 5.842 | |
| 4.06.4.06.03.09.17.0043.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 27.990.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.474.000 | 0 | 15.474.000 | 15.474.000 | 12.516.000 | |
| 4.06.4.06.03.09.17.0044 | Kegiatan Pengelolaan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik | 145.006.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.235.749 | 23.673.600 | 144.909.349 | 144.909.349 | 96.651 | |
| 4.06.4.06.03.09.17.0044.5.2.1 | Belanja Pegawai | 900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 400.000 | 900.000 | 900.000 | 0 | |
| 4.06.4.06.03.09.17.0044.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 400.000 | 900.000 | 900.000 | 0 | |
| 4.06.4.06.03.09.17.0044.5.2.1.01.02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa | 900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 400.000 | 900.000 | 900.000 | 0 | |
| 4.06.4.06.03.09.17.0044.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 144.106.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.735.749 | 23.273.600 | 144.009.349 | 144.009.349 | 96.651 | |
| 4.06.4.06.03.09.17.0044.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 6.609.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.512.449 | 0 | 6.512.449 | 6.512.449 | 96.551 | |
| 4.06.4.06.03.09.17.0044.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 3.929.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.832.449 | 0 | 3.832.449 | 3.832.449 | 96.551 | |
| 4.06.4.06.03.09.17.0044.5.2.2.01.04 | Belanja Peranko, Materai Dan Benda Pos Lainnya | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.000 | 0 | 180.000 | 180.000 | 0 | |
| 4.06.4.06.03.09.17.0044.5.2.2.01.15 | Belanja Alat Peraga/Bahan Pelatihan/Praktek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.06.4.06.03.09.17.0044.5.2.2.01.16 | Belanja Dekorasi/Dokumentasi | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 2.500.000 | 0 | |
| 4.06.4.06.03.09.17.0044.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 84.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.000.000 | 21.000.000 | 84.000.000 | 84.000.000 | 0 | |
| 4.06.4.06.03.09.17.0044.5.2.2.03.06 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet | 84.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.000.000 | 21.000.000 | 84.000.000 | 84.000.000 | 0 | |
| 4.06.4.06.03.09.17.0044.5.2.2.03.20 | Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.06.4.06.03.09.17.0044.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 4.754.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.127.400 | 626.600 | 4.754.000 | 4.754.000 | 0 | |
| 4.06.4.06.03.09.17.0044.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 4.754.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.127.400 | 626.600 | 4.754.000 | 4.754.000 | 0 | |
| 4.06.4.06.03.09.17.0044.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 15.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 15.000.000 | 0 | |
| 4.06.4.06.03.09.17.0044.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 15.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 15.000.000 | 0 | |
| 4.06.4.06.03.09.17.0044.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 33.743.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.095.900 | 1.647.000 | 33.742.900 | 33.742.900 | 100 | |
| 4.06.4.06.03.09.17.0044.5.2.2.15.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 19.650.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.003.000 | 1.647.000 | 19.650.000 | 19.650.000 | 0 | |
| 4.06.4.06.03.09.17.0044.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 14.093.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.092.900 | 0 | 14.092.900 | 14.092.900 | 100 | |
| 4.06.4.06.03.09.17.0045 | Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa | 505.689.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381.640.354 | 119.975.210 | 501.615.564 | 501.615.564 | 4.073.436 | |
| 4.06.4.06.03.09.17.0045.5.2.1 | Belanja Pegawai | 2.700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.400.000 | 1.300.000 | 2.700.000 | 2.700.000 | 0 | |
| 4.06.4.06.03.09.17.0045.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 2.700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.400.000 | 1.300.000 | 2.700.000 | 2.700.000 | 0 | |
| 4.06.4.06.03.09.17.0045.5.2.1.01.02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan | 2.700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.400.000 | 1.300.000 | 2.700.000 | 2.700.000 | 0 | |

| | Jasa | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|---|---|---|---|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|--|
| 4.06.4.06.03.09.17.0045.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 502.989.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380.240.354 | 118.675.210 | 498.915.564 | 498.915.564 | 4.073.436 | |
| 4.06.4.06.03.09.17.0045.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 13.209.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.135.904 | 8.050.000 | 13.185.904 | 13.185.904 | 23.096 | |
| 4.06.4.06.03.09.17.0045.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.159.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.135.904 | 0 | 2.135.904 | 2.135.904 | 23.096 | |
| 4.06.4.06.03.09.17.0045.5.2.2.01.04 | Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 300.000 | 300.000 | 0 | |
| 4.06.4.06.03.09.17.0045.5.2.2.01.15 | Belanja Alat Peraga/Bahan Pelatihan/Praktek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.06.4.06.03.09.17.0045.5.2.2.01.16 | Belanja Dekorasi/Dokumentasi | 10.750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.700.000 | 8.050.000 | 10.750.000 | 10.750.000 | 0 | |
| 4.06.4.06.03.09.17.0045.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 365.214.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.300.000 | 85.414.000 | 361.714.000 | 361.714.000 | 3.500.000 | |
| 4.06.4.06.03.09.17.0045.5.2.2.03.06 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet | 149.614.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.000.000 | 68.614.000 | 149.614.000 | 149.614.000 | 0 | |
| 4.06.4.06.03.09.17.0045.5.2.2.03.20 | Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.06.4.06.03.09.17.0045.5.2.2.03.32 | Belanja Jasa Tenaga Teknis | 215.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.300.000 | 16.800.000 | 212.100.000 | 212.100.000 | 3.500.000 | |
| 4.06.4.06.03.09.17.0045.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.560.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.450.500 | 109.500 | 1.560.000 | 1.560.000 | 0 | |
| 4.06.4.06.03.09.17.0045.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 1.560.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.450.500 | 109.500 | 1.560.000 | 1.560.000 | 0 | |
| 4.06.4.06.03.09.17.0045.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 26.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.500.000 | 2.500.000 | 26.000.000 | 26.000.000 | 0 | |
| 4.06.4.06.03.09.17.0045.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 26.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.500.000 | 2.500.000 | 26.000.000 | 26.000.000 | 0 | |
| 4.06.4.06.03.09.17.0045.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 69.206.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.403.950 | 22.601.710 | 69.005.660 | 69.005.660 | 200.340 | |
| 4.06.4.06.03.09.17.0045.5.2.2.15.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 15.860.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.694.500 | 0 | 15.694.500 | 15.694.500 | 165.500 | |
| 4.06.4.06.03.09.17.0045.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 53.346.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.709.450 | 22.601.710 | 53.311.160 | 53.311.160 | 34.840 | |
| 4.06.4.06.03.09.17.0045.5.2.2.21 | Belanja Jasa Konsultansi | 27.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.450.000 | 0 | 27.450.000 | 27.450.000 | 350.000 | |
| 4.06.4.06.03.09.17.0045.5.2.2.21.05 | Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi | 27.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.450.000 | 0 | 27.450.000 | 27.450.000 | 350.000 | |
| 4.06.4.06.03.09.17.0046 | Kegiatan Pembinaan SDM dan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa | 191.589.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.794.847 | 15.618.000 | 190.412.847 | 190.412.847 | 1.176.153 | |
| 4.06.4.06.03.09.17.0046.5.2.1 | Belanja Pegawai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.06.4.06.03.09.17.0046.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.06.4.06.03.09.17.0046.5.2.1.01.02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.06.4.06.03.09.17.0046.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 191.589.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.794.847 | 15.618.000 | 190.412.847 | 190.412.847 | 1.176.153 | |
| 4.06.4.06.03.09.17.0046.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 8.909.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.235.526 | 0 | 8.235.526 | 8.235.526 | 673.474 | |
| 4.06.4.06.03.09.17.0046.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.509.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.835.526 | 0 | 1.835.526 | 1.835.526 | 673.474 | |
| 4.06.4.06.03.09.17.0046.5.2.2.01.16 | Belanja Dekorasi/Dokumentasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.06.4.06.03.09.17.0046.5.2.2.01.21 | Belanja Perlengkapan Diklat/Seminar/Bintek/Sosialisasi/Lokakarya | 6.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.400.000 | 0 | 6.400.000 | 6.400.000 | 0 | |
| 4.06.4.06.03.09.17.0046.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 130.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.500.000 | 10.500.000 | 130.000.000 | 130.000.000 | 0 | |
| 4.06.4.06.03.09.17.0046.5.2.2.03.20 | Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 4.000.000 | 0 | |
| 4.06.4.06.03.09.17.0046.5.2.2.03.32 | Belanja Jasa Tenaga Teknis | 126.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.500.000 | 10.500.000 | 126.000.000 | 126.000.000 | 0 | |
| 4.06.4.06.03.09.17.0046.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 540.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540.000 | 0 | 540.000 | 540.000 | 0 | |
| 4.06.4.06.03.09.17.0046.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 540.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540.000 | 0 | 540.000 | 540.000 | 0 | |
| 4.06.4.06.03.09.17.0046.5.2.2.07 | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 4.06.4.06.03.09.17.0046.5.2.2.07.07 | Belanja Sewa Hotel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.06.4.06.03.09.17.0046.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 7.530.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.460.000 | 1.070.000 | 7.530.000 | 7.530.000 | 0 |
| 4.06.4.06.03.09.17.0046.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 3.330.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.260.000 | 1.070.000 | 3.330.000 | 3.330.000 | 0 |
| 4.06.4.06.03.09.17.0046.5.2.2.11.05 | Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan | 4.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.200.000 | 0 | 4.200.000 | 4.200.000 | 0 |
| 4.06.4.06.03.09.17.0046.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 44.610.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.059.321 | 4.048.000 | 44.107.321 | 44.107.321 | 502.679 |
| 4.06.4.06.03.09.17.0046.5.2.2.15.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 16.031.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.667.321 | 4.048.000 | 15.715.321 | 15.715.321 | 315.679 |
| 4.06.4.06.03.09.17.0046.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 28.579.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.392.000 | 0 | 28.392.000 | 28.392.000 | 187.000 |
| 4.06.4.06.03.09.17.0046.5.2.2.17 | Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.06.4.06.03.09.17.0046.5.2.2.17.01 | Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.06.4.06.03.09.17.0047 | Kegiatan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa | 319.750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.378.177 | 20.016.000 | 313.394.177 | 313.394.177 | 6.355.823 |
| 4.06.4.06.03.09.17.0047.5.2.1 | Belanja Pegawai | 122.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.000.000 | 0 | 117.000.000 | 117.000.000 | 5.000.000 |
| 4.06.4.06.03.09.17.0047.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 122.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.000.000 | 0 | 117.000.000 | 117.000.000 | 5.000.000 |
| 4.06.4.06.03.09.17.0047.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 122.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.000.000 | 0 | 117.000.000 | 117.000.000 | 5.000.000 |
| 4.06.4.06.03.09.17.0047.5.2.1.01.02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.06.4.06.03.09.17.0047.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 197.750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.378.177 | 20.016.000 | 196.394.177 | 196.394.177 | 1.355.823 |
| 4.06.4.06.03.09.17.0047.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 4.598.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.160.077 | 0 | 4.160.077 | 4.160.077 | 437.923 |
| 4.06.4.06.03.09.17.0047.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 4.598.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.160.077 | 0 | 4.160.077 | 4.160.077 | 437.923 |
| 4.06.4.06.03.09.17.0047.5.2.2.01.04 | Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.06.4.06.03.09.17.0047.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 126.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.500.000 | 10.500.000 | 126.000.000 | 126.000.000 | 0 |
| 4.06.4.06.03.09.17.0047.5.2.2.03.20 | Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.06.4.06.03.09.17.0047.5.2.2.03.32 | Belanja Jasa Tenaga Teknis | 126.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.500.000 | 10.500.000 | 126.000.000 | 126.000.000 | 0 |
| 4.06.4.06.03.09.17.0047.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 3.900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.663.600 | 0 | 3.663.600 | 3.663.600 | 236.400 |
| 4.06.4.06.03.09.17.0047.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.06.4.06.03.09.17.0047.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 3.900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.663.600 | 0 | 3.663.600 | 3.663.600 | 236.400 |
| 4.06.4.06.03.09.17.0047.5.2.2.07 | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.06.4.06.03.09.17.0047.5.2.2.07.07 | Belanja Sewa Hotel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.06.4.06.03.09.17.0047.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 10.700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.200.000 | 0 | 10.200.000 | 10.200.000 | 500.000 |
| 4.06.4.06.03.09.17.0047.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 10.700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.200.000 | 0 | 10.200.000 | 10.200.000 | 500.000 |
| 4.06.4.06.03.09.17.0047.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 52.552.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.854.500 | 9.516.000 | 52.370.500 | 52.370.500 | 181.500 |
| 4.06.4.06.03.09.17.0047.5.2.2.15.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 52.552.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.854.500 | 9.516.000 | 52.370.500 | 52.370.500 | 181.500 |
| 4.06.4.06.03.09.17.0047.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.06.4.06.03.09.17.0049 | Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa | 602.802.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570.441.343 | 30.702.600 | 601.143.943 | 601.143.943 | 1.658.057 |
| 4.06.4.06.03.09.17.0049.5.2.1 | Belanja Pegawai | 48.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.000.000 | 4.000.000 | 48.000.000 | 48.000.000 | 0 |
| 4.06.4.06.03.09.17.0049.5.2.1.02 | Honorarium Non PNS | 48.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.000.000 | 4.000.000 | 48.000.000 | 48.000.000 | 0 |
| 4.06.4.06.03.09.17.0049.5.2.1.02.04 | Honorarium Pelaksana Kegiatan | 48.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.000.000 | 4.000.000 | 48.000.000 | 48.000.000 | 0 |
| 4.06.4.06.03.09.17.0049.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 554.802.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526.441.343 | 26.702.600 | 553.143.943 | 553.143.943 | 1.658.057 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|----------|----------|----------|--------------------|----------|--------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 4.06.4.06.03.09.17.0049.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 22.930.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.299.463 | 0 | 22.299.463 | 22.299.463 | 630.537 |
| 4.06.4.06.03.09.17.0049.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 22.930.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.299.463 | 0 | 22.299.463 | 22.299.463 | 630.537 |
| 4.06.4.06.03.09.17.0049.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 84.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.000.000 | 7.000.000 | 84.000.000 | 84.000.000 | 0 |
| 4.06.4.06.03.09.17.0049.5.2.2.03.32 | Belanja Jasa Tenaga Teknis | 84.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.000.000 | 7.000.000 | 84.000.000 | 84.000.000 | 0 |
| 4.06.4.06.03.09.17.0049.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.06.4.06.03.09.17.0049.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.06.4.06.03.09.17.0049.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 59.740.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.680.000 | 0 | 59.680.000 | 59.680.000 | 60.000 |
| 4.06.4.06.03.09.17.0049.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 59.740.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.680.000 | 0 | 59.680.000 | 59.680.000 | 60.000 |
| 4.06.4.06.03.09.17.0049.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 388.132.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367.461.880 | 19.702.600 | 387.164.480 | 387.164.480 | 967.520 |
| 4.06.4.06.03.09.17.0049.5.2.2.15.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 199.246.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.146.318 | 19.702.600 | 198.848.918 | 198.848.918 | 397.082 |
| 4.06.4.06.03.09.17.0049.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 188.886.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.315.562 | 0 | 188.315.562 | 188.315.562 | 570.438 |
| Jumlah | | 2.597.954.000 | 0 | 0 | 0 | 108.680.000 | 0 | 108.680.000 | 2.228.748.104 | 233.181.910 | 2.461.930.014 | 2.570.610.014 | 27.343.986 |
| | Penerimaan : | | | | | | | | | | | | |
| | -SP2D | | 0 | 0 | 0 | 108.680.000 | 0 | 108.680.000 | 2.475.541.202 | 0 | 2.475.541.202 | 2.584.221.202 | |
| | -Potongan Pajak | | | | | | | | | | | | |
| | a. PPN | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.108.854 | 8.714.909 | 31.823.763 | 31.823.763 | |
| | b. PPh-21 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.552.500 | 285.000 | 46.837.500 | 46.837.500 | |
| | c. PPh-22 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.332.919 | 0 | 1.332.919 | 1.332.919 | |
| | d. PPh-23 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.986.816 | 1.922.225 | 8.909.041 | 8.909.041 | |
| | e. PPh Ps. 4 (2) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - Lain-lain | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Jumlah Penerimaan | | 0 | 0 | 0 | 108.680.000 | 0 | 108.680.000 | 2.553.522.291 | 10.922.134 | 2.564.444.425 | 2.673.124.425 | |
| | Pengeluaran : | | | | | | | | | | | | |
| | -SPJ (LS+ GU/TU) | | 0 | 0 | 0 | 108.680.000 | 0 | 108.680.000 | 2.228.748.104 | 233.181.910 | 2.461.930.014 | 2.570.610.014 | |
| | -Penyetoran Pajak | | | | | | | | | | | | |
| | a. PPN | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.108.854 | 8.714.909 | 31.823.763 | 31.823.763 | |
| | b. PPh-21 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.552.500 | 285.000 | 46.837.500 | 46.837.500 | |
| | c. PPh-22 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.332.919 | 0 | 1.332.919 | 1.332.919 | |
| | d. PPh-23 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.986.816 | 1.922.225 | 8.909.041 | 8.909.041 | |
| | e. PPh Ps. 4 (2) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - Lain-lain | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.611.188 | 13.611.188 | 13.611.188 | |
| | Jumlah Pengeluaran | | 0 | 0 | 0 | 108.680.000 | 0 | 108.680.000 | 2.306.729.193 | 257.715.232 | 2.564.444.425 | 2.673.124.425 | |
| | Saldo Kas | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.793.098 | -246.793.098 | 0 | 0 | |

Semarang, 31 Desember 2020

Kuasa Pengguna Anggaran

(Ir. YUNI ASTUTI, MA)
NIP.19620621 198709 2 001

Bendahara Pengeluaran Pembantu

(GINANJAR AVRI ADIANTO, A.Md)
NIP.19840421 201101 1 010